

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT MASUKNYA PERKEBUNAN SAWIT DI LAHAN RAWA DESA TABATAN BARU, KECAMATAN KURIPAN, KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN

Wisnu Subroto, Rochgiyanti

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Sejarah ULM, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

*Surel: dewabroto@gmail.com

Abstract

Tabatan is a small village located on the banks of the Barito River with ahead of the household of less than 300 families. The village provides an overview of the dynamic changes in the economic structure of the villagers with the entry of large-scale oil palm plantations. In the name of modernization, a company imposes fundamental changes to the subsistence villagers. This gives rise to various consequences in everyday life. The consequences can be both constructive and destructive, depending on the mindset of the villagers. This study looks for a meaning of change that occurs on the condition of natural objects. Qualitative method is used as a guide to obtain objective results

Keywords: change, economic structure, villagers, oil palm plantation

1. PENDAHULUAN

Bagi negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan sumber kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. UUD 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jiwa dan semangat undang-undang tersebut merupakan dasar bagi demokrasi ekonomi, dan jaminan bagi masyarakat dalam pengelolaan tanah garapannya. Bagi masyarakat, khususnya petani dan peternak, tanah bukan saja sebagai sumber kehidupan, bernilai ekonomis, namun seringkali juga bermakna magis, religius, dan ideologis. Mereka sangat menghormati tanah, dan melakukan berbagai ritual sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas tanah yang telah memberikan kehidupan.

Untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, di awal lahirnya penyelenggaraan negara, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. UUPA tersebut lahir di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan Indonesia, dan kebutuhan mendesak akan jaminan kepada rakyat untuk mengakses, memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya agraria. Berdasarkan tujuan UUPA 1960, undang-undang tersebut didasarkan pada semangat kemanusiaan dan keadilan sosial bagi rakyat kecil. Nampaknya perubahan orientasi pembangunan di masa Orde Baru yang kapitalistik, mengedepankan

pertumbuhan ekonomi, berorientasi pada perkembangan industri, telah menimbulkan perubahan kebijakan di bidang agraria. Masuknya investasi modal asing dan perkembangan industri mensyaratkan ketersediaan tanah, sehingga tanah menjadi sebuah komoditas. Investasi modal asing mensyaratkan adanya kepastian hukum yang legal-formal dan positivistik. Peran negara didesain untuk mendukung kepentingan investasi modal asing sehingga meminggirkan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Persoalan tentang tanah akan selalu berdampingan dengan kuasa negara dan modal, dan tanah akan menjadi komoditas ketika formasi dan struktur sosial ditikam oleh kapitalisme global (Lounela & Zakaria, 2002).

Persoalan alih fungsi lahan juga terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Barito Kuala. Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten penghasil beras terbesar. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala tahun 2009, kabupaten ini menyumbang 16,23% pasokan beras di tingkat provinsi. Luas lahan pertanian di kabupaten ini bertambah 5,15% dibandingkan tahun sebelumnya, namun luas lahan sawah menurun 5,05%. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah Kabupaten Barito Kuala melirik komoditas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengizinkan pembukaan lahan perkebunan sawit.

Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang berpotensi besar dalam pengembangan usaha perkebunan karet dan kelapa sawit. Berdasarkan

data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (2015:268), angka perkembangan luas usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito. Peningkatan luasan lahan perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Potensi lahan tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

Budidaya kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala dilakukan di lahan nonproduktif dan lahan-lahan terlantar, seperti kawasan tanah bergambut dan rawa monoton, bukan menghilangkan sawah (Antara, 8 Juni 2015). Panen perdana kelapa sawit dilakukan oleh Bupati H. Hasan Murad bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) pada 6 Mei 2015 (Habar Banua 2015). Panen kelapa sawit itu dilaksanakan di lahan mandiri masyarakat milik Kelompok Tani (KT) Harapan Makmur Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya. Panen yang dilakukan di lahan seluas 50 hektare itu merupakan kegiatan sharing antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Barito Kuala dengan Dishutbun Provinsi Kalimantan Selatan sejak 2011 silam, dimana Dishutbun provinsi menyediakan bantuan bibit dan pengolahan lahan, sedangkan Dishutbun Kabupaten Barito Kuala menyediakan saprodi berupa pupuk dan pemeliharaan. Usai panen dilanjutkan dengan peresmian pengiriman perdana kelapa sawit milik masyarakat kepada pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik PT Agri Bumi Sentosa (ABS) dan PT Anugerah Watindo (AW) yang berlokasi di Desa Talaran Kecamatan Marabahan.

Berdasarkan informasi Kepala Dishutbun Kabupaten Barito Kuala (Habar Banua, 06 May 2015) pengembangan perkebunan rakyat hasil binaan Dishutbun Kabupaten Barito Kuala sudah mencapai 350 hektare, terbagi 12 kelompok yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu lima KT di Kecamatan Cerbon (tiga KT di Desa Sawahan seluas 50 hektare dan dua KT di Desa Sinar Baru seluas 75 hektare), empat KT di Kecamatan Wanaraya (dua KT di Desa Kolam Makmur seluas 50 hektare dan dua KT di Desa Babad Raya seluas 50 hektare), dan 3 KT di Desa Jejangkit Timur, Kecamatan Jejangkit seluas 100 hektare. Pengembangan perkebunan rakyat binaan Dishutbun ini merupakan bentuk kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit PT Agro Bumi Sentosa (ABS) dan PT Anugerah Watindo (AW) yang siap menampung hasil panen buah kelapa sawit dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan pembatasan luas areal penanaman kelapa sawit seluas 103.000 hektare.

Perkembangan luasan lahan kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran pada beberapa pihak. Sebagai bukti, luas lahan perkebunan sawit sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebelumnya hanya 45 ribu hektare, namun dalam RTRWK terbaru bertambah menjadi 103.000 hektare atau mengalami kenaikan lebih dari 200% (Borneo News 2015). Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan fungsi lahan tidur menjadi perkebunan sawit di Desa Banitan dan Balukung Kecamatan Bakumpai. Lahan seluas 300 hektare di kedua desa tersebut telah dikelola oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit. Terjadinya perluasan lahan kelapa sawit juga diakui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Barito Kuala. Ia mengatakan bahwa kuota lahan perkebunan sawit tidak lagi hanya seluas 45.000 hektare tetapi sudah mencapai 103.000 hektare. Dalam pengeluaran Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dishutbun serta Bappeda (Borneo News 2015).

Peningkatan areal perkebunan sawit di Kalimantan Selatan terjadi pada perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Pertambahan luas areal perkebunan kelapa sawit tahun 2013-2015 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan 2013-2015

Tahun	Perkebunan Rakyat (ha)	Perkebunan Swasta (ha)	Jumlah (ha)
2013	69.449	16.886	475.739
2014	72.570	17.362	499.873
2015	75.569	17.851	524.229

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2014

Dari data tersebut nampak bahwa luas perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2015), perluasan areal perkebunan sawit selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perluasan area perkebunan sawit di Barito Kuala

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Luas (ha)	450	705	1.476	2.368	2.370

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala 2015

Menurut data Walhi Kalsel, di Kalimantan Selatan akan dibuka sekitar 1,1 juta hektare perkebunan sawit, saat ini baru terealisasi 400 ribu hektare, dan perluasan lahan lebih diarahkan ke

daerah rawa (Frasetiandy 2013). Hampir semua wilayah kabupaten yang memiliki wilayah rawa tidak terlepas dari ekspansi perkebunan sawit, mulai dari Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong.

Masuknya perkebunan sawit ke wilayah lahan rawa akan membawa konsekuensi terhadap mata pencaharian penduduk yang terbiasa menggantungkan hidup dari sumber rawa. Dari catatan Frasetiandy (2011) keluhan permasalahan perkebunan sawit telah dirasakan oleh warga Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, karena hutan galam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat telah dirambah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah daerah. Lahan galam yang dulu seluas 9 km² hanya tersisa 6 km² karena dijadikan lahan perkebunan sawit oleh PT Putra Bangun Banua (PBB), dan sisanya tidak terlepas dari provokasi perusahaan dengan dalih Hak Guna Usaha.

Sebelum masuknya usaha perkebunan sawit, seperti ditulis Frasetiandy (2011), warga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan mencari galam bisa memperoleh penghasilan 100 ribu rupiah per hari, namun dengan masuknya perkebunan sawit, mereka hanya bisa memperoleh pendapatan 30 ribu rupiah dari pekerjaan sebagai buruh perkebunan sawit. Perluasan lahan perkebunan sawit juga mengancam hilangnya matapencaharian warga yang menggantungkan penghidupannya pada hasil-hasil alam di rawa monoton, seperti hilangnya sumur/kolam ikan/beje yang digunakan untuk memelihara ikan secara alamiah, hilangnya hutan galam dan rotan, mengancam ladang purun sebagai bahan baku pembuatan tikar, dan mengancam lahan penggembalaan ternak kerbau rawa.

Menurut data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Kuala (2010) jumlah perusahaan yang sudah memiliki izin lokasi empat perusahaan. Sudah bisa dipastikan 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala akan menjadi lokasi perkebunan sawit dari empat perusahaan. PT Putra Bangun Bersama dengan luas 6.744 hektare di Kecamatan Jajangkit, Rantau Badauh, dan Cerbon. PT Angri Bumi Sentosa (ABS) dengan luas lahan mencapai 10.000 hektare di Kecamatan Tabukan, Wanaraya, Barambai, dan Marabahan. PT Citra Putera Kebun Aseri (CPKA) dengan luas lahan 7.900 hektare di Kecamatan Kuripan dan Bakumpai. PT Tiga Daun dengan luas lahan 9.000 hektare di Kecamatan Mekarsari, Tamban, dan Tabunganen. Menurut Bupati Barito Kuala (Frasetiandy 2011), tujuan diijinkan beroperasinya perkebunan sawit demi kesejahteraan warga. Misalnya warga yang

dulunya mencari kayu dan menangkap ikan dan sebagai petani bisa beralih sebagai petani sawit, apalagi 20% lahan perkebunan diperuntukkan bagi warga sebagai pola kemitraan.

Penelitian tentang perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto & Harri (2010) menemukan bahwa masuknya perkebunan kelapa sawit di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikia, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, mengakibatkan terjadinya perubahan struktur sosial dan kepemimpinan lokal. Jika sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit, kepemimpinan lokal didominasi oleh penghulu/tokoh adat, dan pembekal/tokoh kampung; sesudah masuknya perkebunan kelapa sawit, kepemimpinan lokal didominasi oleh elit perkebunan, tuan tanah, dan golongan profesional, serta tokoh agama.

Penelitian lain tentang dampak dari perluasan perkebunan sawit telah dilakukan oleh Zaiyardam (2016) di Indragiri Hulu, Riau, dalam periode 1978-2010 yang menimbulkan perlawanan para petani. Studi ini melihat ekspansi kapitalisme perkebunan di Indragiri Hulu yang telah menimbulkan berbagai persoalan yang melibatkan tiga kelompok kepentingan, yaitu penguasa, pengusaha, dan petani. Zaiyardam melihat hubungan antara penguasa dan pengusaha bersifat kooperatif, sebaliknya hubungan keduanya dengan rakyat bersifat eksploitatif. Kondisi ini berakibat pada munculnya berbagai perlawanan petani, baik yang dilakukan secara tertutup maupun terbuka.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi masyarakat di Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit dan sesudah masuknya perkebunan kelapa sawit. Diasumsikan bahwa masuknya perkebunan kelapa sawit telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat. Selain itu masuknya perkebunan sawit diasumsikan akan berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik berupa dampak positif maupun negatif.

2. METODE

Metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Uji karakterisasi yang dilakukan adalah analisis fisik, yaitu uji kerapatan, kadar air, zar terbang, kadar abu, karbon terikat dan nilai kalor sesuai SNI, dan analisis komposisi unsur serta morfologi sampel dengan SEM-EDX. Karakterisasi analisis fisik dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Unlam, kecuali uji nilai kalor dilakukan di Baristand, Banjarbaru, sedangkan uji dengan SEM-EDX dilakukan di Laboratorium Material Maju UM Malang. Adapun alat-alat yang digunakan antara lain gelas ukur, saringan, *bomb calorimeter* dan SEM-EDX.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan mengenai aktivitas para aktor belum jelas, permasalahan yang dihadapi para aktor masih bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarung dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Tempat ini dipilih karena wilayah Kecamatan Kuripan berupa rawa monoton dan termasuk lokasi perkebunan sawit

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan alih fungsi lahan terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Barito Kuala, kecamatan Kuripan desa Tabatan. Daerah Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten penghasil beras terbesar. Dilihat dari hasil pertanian yang berupa beras yang dihasilkan maka sebagian besar penduduk Barito kuala berprofesi sebagai petani. Tanah yang dikerjakan adalah milik pribadi, tanah negara atau tanah ulayat. Sebagian penduduknya bekerja sebagai pedagang, tukang, peternak kerbau, pencari kayu galam, dan pencari ikan (Ikan papuyu, haruan, sapat).

Di bidang perkebunan, Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah pengembangan usaha perkebunan karet dan kelapa sawit. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala (2015:268) dapat dilihat angka perkembangan luas usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito. Peningkatan luasan lahan perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Adanya potensi lahan tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

Budidaya kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala dilakukan di lahan nonproduktif dan lahan-lahan terlantar, seperti kawasan tanah bergambut dan rawa monoton, bukan menghilangkan sawah (Antara, 8 Juni 2015). Perkembangan luasan lahan kelapa sawit menimbulkan kekhawatiran pada beberapa pihak. Sebagai bukti, luas lahan perkebunan sawit sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebelumnya hanya 45 ribu hektare, namun dalam RTRWK terbaru bertambah menjadi 103.000 hektare atau mengalami kenaikan lebih dari 200% (Borneo News 2015). Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan fungsi lahan tidur menjadi perkebunan sawit di Desa Banitan dan Balukung Kecamatan Bakumpai. Lahan seluas 300 hektare di kedua desa tersebut telah dikelola oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit. Terjadinya perluasan lahan kelapa sawit juga diakui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Barito Kuala, yang mengatakan bahwa kuota lahan perkebunan sawit tidak lagi hanya seluas 45.000 hektare tetapi sudah mencapai 103.000 hektare. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam mengeluarkan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dishutbun serta Bappeda (Borneo News 2015).

Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat desa sangat berbeda dari yang diberitakan oleh media-media tersebut. Salah satunya Desa Tabatan. Desa ini mengalami kemunduran dalam bidang pertanian. Penduduk desa yang sebelumnya sebagai petani penggarap di lahan-lahan kosong berupa rawa dan gambut tidak dapat menanam kembali tanah tersebut karena sudah diserobot perusahaan perkebunan. Menurut penduduk desa lahan yang telah dikuasai perusahaan dengan HGU (hak guna usaha) merupakan tanah milik mereka karena telah dikelola mulai dari bapak-bapak, kakek-kakek mereka. Penduduk desa yang tidak memiliki hak kepemilikan lahan, contohnya sertipikat tanah, dapat dengan mudah disingkirkan oleh perusahaan yang telah memiliki izin mengelola lahan tersebut. Walaupun ada perundingan dengan petani penggarap lahan dan ganti rugi, itupun tidak seberapa besarnya (Rp3,5 juta/lahan, tidak memerhatikan berapa luas lahan yang dikerjakan petani).

Para petani dari desa Tabatan yang sebelumnya mampu mencukupi kebutuhan hidup dari pertanian, sekarang tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Para pencari ikan di sumur-sumur atau kolam-kolam yang mereka buat dilahan rawa tidak dapat lagi di kelola karena telah tergusur oleh perkebunan kelapa sawit.

Para pencari kayu galam juga tidak dapat mencari kayu karena lahannya habis ditanami kelapa sawit.

Penghasilan pencari ikan setiap hari berjumlah 8-10 kg jikalau di uangkan sekitar Rp200.000 – Rp 300.000, setelah adanya perkebunan, para pencari ikan tersebut hanya memperoleh 2-4kg, apabila diuangkan sekitar Rp40.000 – Rp80.000. Para pencari/penebang kayu galam yang semula berpenghasilan Rp100.000 –Rp200.000, sekarang kehilangan mata pencahariaannya. Yang lebih ironis lahan gembala kerbau rawa yang semula begitu luas sekarang mulai menyempit karena telah dipagari untuk perkebunan.

Penduduk desa Tabatan yang memiliki tabungan mulai mendirikan rumah walet untuk investasi masa depan mereka. Hal ini dilakukan karena mata pencaharian mereka telah diserobot oleh perkebunan sawit. Penduduk desa yang tidak tahan menghadapi kondisi seperti ini memilih pindah tempat tinggal dan mencari pekerjaan lain di perkotaan. Penduduk desa Tabatan yang semula 300 KK menjadi 280 KK (kepala keluarga).

4. SIMPULAN

Keberadaan perkebunan kelapa sawit sebagai sebuah industri yang padat modal dan padat karya telah membawa perubahan dalam kehidupan dan struktur ekonomi masyarakat Tabatan secara mendasar. Kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Tabatan setelah hadirnya perkebunan di sekitar daerah mereka pada akhirnya sirna. Masyarakat Desa Tabatan merasa dibohongi dan dibodohi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka yang berkerja di perusahaan hanya sebagian kecil saja dari penduduk desa tersebut.

Masyarakat Desa Tabatan yang berprofesi sebagai petani, peternak kerbau, pencari kayu dan pencari ikan di ladang-ladang tidak dapat lagi mencari ikan di sekitar lahan sawit karena buruknya kualitas air yang berada di sekitar perkebunan tersebut. Pada akhirnya masyarakat desa ini beralih pekerjaan sebagai pengayam tikar purun, pembuat kapal dan usaha membuat rumah walet.

5. DAFTAR PUSTAKA

Antara. *Barito Kuala Pertahankan Lahan Sawah*. 8 Juni 2015.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. 2015. *Barito Kuala dalam Angka 2015*.

Bintarto R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Borneo News. *Suara Rakyat Kalimantan*. 28 Mei 2015.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*. Balai Pustaka, Jakarta.
Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. *Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015 Kelapa Sawit*.
Frasetiandy D. 2011. *Risau di Sungai Rasau, Barito Kuala*. meratusinstitute 28 Juni 2011.
Frasetiandy D. 2013. *Menakar Dampak Sosial Perkebunan Sawit*, <http://walhikasel.or.id/?p=35>.
Habar Banua, 2015. *Bupati Panen Perdana Kelapa Sawit*. 06 May 2015.
Karnaji. 2004. Pranata ekonomi. In: JD Narwoko, B Suyanto (eds.). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan. Edisi I, Cetakan I*. Prenada, Jakarta.
Lauer RH. 2003. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Rineka Cipta, Jakarta.
Lounela A, Zakaria RY. 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Insist Press, Jurnal Antropologi Indonesia Universitas Indonesia, dan KARSA (Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraris), Yogyakarta.
Martono N. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Rajawali Pers, Jakarta.
Mashud M. 2004. Perubahan sosial. In: JD Narwoko, B Suyanto (eds.). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan. Edisi I, Cetakan I*. Prenada, Jakarta.
Miles MB, Huberman AM. 1985. *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods*. Third printing. Sage Publications, Beverly Hills, California.
Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Shahab K. 2012. *Sosiologi Pedesaan*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta .
Soekanto S. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar. Cetakan ke-34*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
Suranto AW. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Yulianto A., Harri E. 2010. Perubahan struktur sosial dan kepemimpinan lokal masyarakat akibat masuknya perkebunan kelapa sawit di Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal EEP*, 1(7), 39-46.
Zubir Z. 2016. *cPenguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Kesenjangan Sosial, Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu Riau, 1978-2010*. Disertasi (Tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.